

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Fenomena femisida di Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender telah berkembang menjadi krisis nasional yang memerlukan respons serius dari negara. Sejak tahun 2020, pemerintah Afrika Selatan mulai melakukan berbagai upaya strategis, seperti pembentukan Rencana Strategi Nasional Kekerasan Berbasis Gender dan Femisida, reformasi regulasi dan hukum terkait kekerasan seksual, pembentukan Dewan Nasional Kekerasan Berbasis Gender dan Femisida, hingga penguatan implementasi di tingkat lapangan. Meskipun demikian, implementasi berbagai kebijakan tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Penurunan angka kekerasan berbasis gender dan femisida belum terlihat secara signifikan akibat pelaksanaan program yang belum konsisten, jangkauan kebijakan yang masih terbatas, serta ketimpangan kapasitas di berbagai daerah, terutama wilayah pedesaan dan terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan femisida di Afrika Selatan tidak hanya membutuhkan pembentukan kebijakan dan regulasi, tetapi juga penguatan implementasi, pengawasan, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat sipil, dan aktor internasional agar upaya yang dilakukan dapat menghasilkan perubahan yang lebih nyata dan menyeluruh.

Sebagai organisasi internasional, UN Women telah menjalankan berbagai peran penting dalam mendukung upaya pemerintah Afrika Selatan untuk menangani femisida. Sebagai arena, UN Women menyediakan ruang diskusi dan koordinasi yang melibatkan pemerintah, organisasi non-profit, serta berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan strategi penanganan femisida secara komprehensif. Sebagai aktor, UN Women berkontribusi melalui pelaksanaan berbagai proyek, pelatihan, penyusunan policy brief, kegiatan advokasi, serta kolaborasi lintas sektor guna mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif gender dan menginisiasi berbagai terobosan secara independen, salah satunya melalui platform Buy From Women yang bertujuan

meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan. Berbagai upaya tersebut dilakukan tanpa bergantung pada instruksi langsung dari pemerintah Afrika Selatan, sehingga menunjukkan peran aktif dan mandiri UN Women dalam mendorong perlindungan terhadap perempuan. Meskipun data terkait jumlah femisida pada tahun 2020, 2023, dan 2024 masih terbatas akibat lemahnya sistem pendataan dan pencatatan, kontribusi UN Women tetap memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender serta penguatan perlindungan terhadap perempuan di Afrika Selatan.

6.2 Saran

Setelah Penulis menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian Peran UN Women dalam menangani kasus femisida di Afrika Selatan pada tahun 2020 – 2024, selanjutnya Penulis akan memberikan saran yang dapat digunakan.

6.2.1 Saran Akademis

Untuk para akademisi yang tertarik meneliti topik serupa, seperti peran organisasi internasional, kekerasan berbasis gender, femisida, dan isu gender di Afrika Selatan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi serta referensi awal untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, khususnya terkait efektivitas kebijakan, implementasi program, maupun peran aktor internasional dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang ditujukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti para pemangku kebijakan Afrika Selatan dan UN Women. Sebagai salah satu negara dengan femisida tertinggi di dunia, terlebih disebabkan oleh langgengnya budaya kekerasan pada masa apartheid, pemerintah Afrika Selatan harusnya dapat lebih awal mengenali maraknya budaya kekerasan

terhadap perempuan hingga femisida. Seharusnya pemerintah Afrika Selatan dapat memprioritaskan kebijakan demi melindungi perempuan. Tidak hanya itu, pemerintah harusnya teratur dalam pencatatan data kekerasan terhadap dan femisida supaya dapat secara cepat dan cermat untuk merumuskan kebijakan maupun tindakan preventif dan dapat menilai bagaimana sebuah kebijakan telah terimplimentasi dengan baik atau tidak dalam segi dampak.

Untuk UN Women, sebagai organisasi internasional, UN Women dapat memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi program yang telah dijalankan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. UN Women juga perlu mendorong penguatan sistem pendataan femisida yang lebih terintegrasi dan transparan sehingga pemerintah maupun lembaga terkait dapat memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, perlu adanya perluasan jangkauan edukasi dan pemberdayaan perempuan, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok rentan, melalui kerja sama yang lebih intensif dengan pemerintah lokal, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas setempat. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan femisida tidak hanya berfokus pada respons terhadap korban, tetapi juga pada pembangunan kesadaran sosial dan penguatan perlindungan perempuan secara menyeluruh.